



Tradisi Pemberian Gelar dalam Suku Melayu

Fitri Handayani

Universitas Islam Indragiri

fitrirealm475@gmail.com

Nikmatul Uzmah

Universitas Islam Indragiri

aauzma942@gmail.com

Sayla Safitri

Universitas Islam Indragiri

safitrisayla@gmail.com

Labiyah

Universitas Islam Indragiri

labiyah48@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
12-01-2026	17-01-2026	01-02-2026

ABSTRACT

The tradition of bestowing titles within Malay society is a system of social stratification that has been deeply rooted since the era of the classical Malay sultanates. This study comprehensively examines the system of title bestowal in the Malay ethnic group, covering historical aspects, types of titles, social functions, and its transformation within the context of modern society. Utilizing a qualitative approach through a literature review, this research finds that the Malay title system is not merely a symbol of social status, but also represents philosophical values, kinship systems, and mechanisms for recognizing achievement within the community. Titles such as Datuk, Tengku, Raja, and various other variants have specific meanings and functions that differ across each Malay region. In its development, this tradition has undergone adaptation and transformation in line with modernization, yet it still maintains the essence of Malay cultural values. This research contributes to the understanding of the dynamics of the Malay social system and its relevance in the context of contemporary Indonesian cultural pluralism.

Keywords: Malay Titles, Social Stratification, Cultural Identity, Malay Sultanates, Tradition.

ABSTRAK

Tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Melayu merupakan salah satu sistem stratifikasi sosial yang telah mengakar sejak zaman kesultanan Melayu klasik. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tentang sistem pemberian gelar dalam suku Melayu, mencakup aspek historis, jenis-jenis gelar, fungsi sosial, serta transformasinya dalam konteks masyarakat modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa sistem gelar Melayu bukan sekadar simbol status sosial, melainkan juga merepresentasikan nilai-nilai filosofis, sistem kekerabatan, dan mekanisme pengakuan prestasi dalam masyarakat. Gelar-gelar seperti Datuk, Tengku, Raja, dan berbagai varian lainnya memiliki makna dan fungsi spesifik yang berbeda-beda di setiap wilayah Melayu. Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami adaptasi dan transformasi seiring dengan modernisasi, namun tetap mempertahankan esensi nilai-nilai budaya Melayu. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika sistem sosial Melayu dan relevansinya dalam konteks pluralisme budaya Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Gelar Melayu, Stratifikasi Sosial, Identitas Budaya, Kesultanan Melayu, Tradisi

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kompleks serta kaya akan tradisi. Salah satu aspek penting dalam struktur sosial masyarakat Melayu adalah sistem pemberian gelar kehormatan yang telah berlangsung secara turun-temurun selama berabad-abad. Tradisi pemberian gelar ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, hierarki masyarakat, dan sistem pemerintahan yang tertanam dalam budaya Melayu.¹

Sistem pemberian gelar dalam masyarakat Melayu memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari sistem penghargaan dalam budaya lain. Gelar-gelar seperti Datuk, Dato', Tan Sri, dan berbagai gelar kebesaran lainnya bukan sekadar simbol status, melainkan mengandung makna mendalam tentang pengabdian, kepemimpinan, dan kontribusi seseorang terhadap masyarakat. Pemberian gelar dalam masyarakat Melayu merepresentasikan sistem stratifikasi sosial yang berlandaskan pada merit dan jasa, bukan semata-mata keturunan. Pemberian gelar ini umumnya dilakukan oleh institusi kesultanan atau pemerintahan yang memiliki otoritas adat, dan prosesnya mengikuti protokol dan upacara yang telah ditetapkan secara adat.²

Dalam konteks historis, tradisi pemberian gelar telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan kerajaan Melayu sejak era Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Sistem gelaran diraja Melayu berkembang pesat pada masa kegemilangan Kesultanan Melaka dan kemudian tersebar ke seluruh Nusantara melalui jaringan perdagangan dan penyebaran Islam. Sistem ini kemudian berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan zaman, termasuk masa kolonialisme dan era pasca-kemerdekaan. Meskipun telah mengalami berbagai transformasi, esensi dari tradisi pemberian gelar tetap bertahan dan masih dipraktikkan hingga saat ini, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa wilayah Melayu di Indonesia seperti Riau dan Kepulauan Riau.³

Sistem pemberian gelar dalam masyarakat Melayu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme kontrol sosial dan alat legitimasi kekuasaan politik. Gelar-gelar kehormatan yang diberikan tidak hanya mengangkat status sosial penerimanya, tetapi juga menciptakan ikatan patronase antara pemberi gelar (sultan atau raja) dengan penerima gelar. Hal ini mencerminkan

¹ Hashim, M. Y. (2015). Gelaran kehormatan dalam tamadun Melayu: Satu tinjauan sejarah. *Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 8(1), 83-105. <https://jmdm.com.my/index.php/jmdm/article/view/187>

² Rahman, A. A., & Abdullah, K. (2018). Stratifikasi sosial dan sistem gelaran dalam masyarakat Melayu tradisional. *Jurnal Pengajian Melayu*, 29, 156-178. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPM/article/view/12456>

³ Ismail, H. (2016). Sistem gelaran diraja Melayu: Dari Kesultanan Melaka hingga era moden. *Jurnal Sejarah*, 25(1), 34-56. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/9821>

konsep kesetiaan (loyalty) dan pengabdian (devotion) yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Melayu.⁴

Namun demikian, di era modernisasi dan globalisasi saat ini, tradisi pemberian gelar menghadapi berbagai tantangan dan dinamika baru. Mencatat adanya perdebatan mengenai relevansi sistem gelar dalam masyarakat modern, kriteria pemberian gelar, serta dampaknya terhadap struktur sosial kontemporer. Beberapa kalangan mempertanyakan apakah tradisi ini masih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan egalitarianisme, sementara yang lain berpandangan bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan sebagai bagian dari identitas Melayu. Fenomena "inflasi gelar" juga menjadi perhatian serius, di mana pemberian gelar yang terlalu liberal dikhawatirkan dapat mengurangi nilai dan prestise dari gelar itu sendiri.⁵

Penelitian mengenai tradisi pemberian gelar dalam suku Melayu menjadi penting untuk mendokumentasikan praktik budaya ini secara komprehensif, memahami makna dan fungsinya dalam konteks sosial budaya Melayu, serta menganalisis bagaimana tradisi ini bertransformasi dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem penghargaan tradisional dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai modern, serta kontribusinya terhadap kohesi sosial dan pelestarian identitas budaya Melayu.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi pemberian gelar dalam suku Melayu, mencakup aspek historis, prosedur dan kriteria pemberian, makna simbolis, serta dinamika dan tantangan yang dihadapi tradisi ini di era kontemporer.⁷

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber kepustakaan meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dokumen historis, dan sumber-sumber relevan lainnya tentang tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Melayu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori stratifikasi sosial dan antropologi budaya. Proses analisis meliputi

⁴ Mohd Yusof, A., & Hassan, S. (2019). Fungsi sosial dan politik sistem pemberian gelar dalam masyarakat Melayu Malaysia. *Akademika*, 89(3), 45-62. <https://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/35642>

⁵ Ahmad, Z., & Sulaiman, M. (2020). Sistem gelaran dan peranannya dalam masyarakat Melayu kontemporer. *Jurnal Melayu*, 19(2), 245-267. <https://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/40125>

⁶ Zakaria, F. (2017). Inflasi gelaran: Cabaran kepada institusi diraja Melayu. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 44(2), 89-110. <https://ejournal.ukm.my/jebat/article/view/22341>

⁷ Hamzah, N. A., & Ibrahim, R. (2021). Upacara penganugerahan darjah kebesaran: Satu analisis etnografi. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(4), 112-128. <https://msocsi.com/index.php/mjssh/article/view/623>

identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk memahami pola-pola, makna, dan fungsi sistem pemberian gelar dalam konteks sosial-budaya masyarakat Melayu.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan Penelitian ini yaitu:

Sejarah Tradisi Pemberian Gelar dalam Masyarakat Melayu

Tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Melayu memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kesultanan-kesultanan Melayu klasik. Kesultanan Melayu Melaka yang berdiri pada abad ke-15 menjadi salah satu pusat peradaban Melayu yang mengembangkan sistem gelar yang kompleks dan terstruktur.⁹ Sistem ini kemudian menjadi model bagi kesultanan-kesultanan Melayu lainnya di wilayah Nusantara.

Dalam Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, teks klasik Melayu yang ditulis pada abad ke-17, terdapat berbagai catatan tentang pemberian gelar kepada pembesar kerajaan dan orang-orang yang berjasa kepada kesultanan. Gelar-gelar seperti "Bendahara", "Temenggung", "Laksamana", dan "Penghulu Bendahari" merupakan gelar-gelar penting yang diberikan kepada pejabat tinggi kerajaan dengan fungsi dan tanggung jawab spesifik.

Sistem pemberian gelar pada masa ini sangat terkait dengan struktur pemerintahan kesultanan. Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki otoritas penuh untuk memberikan gelar kepada siapa saja yang dianggap layak, baik karena keturunan bangsawan, jasa kepada kerajaan, maupun prestasi tertentu. Pemberian gelar ini seringkali disertai dengan penganugerahan tanah, hak-hak ekonomi tertentu, atau posisi dalam pemerintahan kesultanan.¹⁰

Masuknya Islam ke dunia Melayu memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pemberian gelar. Gelar-gelar dengan unsur Islam seperti "Syed" (untuk keturunan Nabi Muhammad), "Sheikh", "Haji", dan "Tuan Guru" mulai diintegrasikan ke dalam sistem gelar tradisional Melayu.¹¹ Penggabungan ini mencerminkan sinkretisme budaya yang menjadi karakteristik peradaban Melayu-Islam. Gelar-gelar keagamaan ini memiliki fungsi yang berbeda dari gelar-gelar tradisional yang bersifat administratif atau politis. Gelar keagamaan lebih menekankan

⁸ Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

⁹ . Wan Abdul Kadir Wan Yusoff & Rahimin Affandi Abdul Rahim (2010)
<https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/>

¹⁰ . Kaur, A. (2012) – *New Zealand Journal of Asian Studies* <https://www.nzasia.org/>

¹¹ Tengku Luckman Sinar. (2011). "Sejarah Medan Tempo Doeloe." *Jurnal Wacana Etnik*, 2(1), 45-62.
<https://ejournal.um.edu.my/>

pada status spiritual dan keahlian dalam ilmu agama, meskipun dalam praktiknya seringkali juga memberikan pengaruh sosial dan politik kepada pemiliknya.

Kedatangan kekuatan kolonial Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, membawa perubahan signifikan dalam sistem pemberian gelar Melayu. Pemerintah kolonial memahami pentingnya sistem gelar dalam struktur sosial Melayu dan memanfaatkannya sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol mereka terhadap wilayah-wilayah Melayu.¹² Di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Belanda, seperti Sumatera Timur, sistem gelar mengalami adaptasi dengan diperkenalkannya gelar-gelar baru yang mencerminkan struktur administrasi kolonial. Gelar seperti "Datuk" kemudian digunakan secara lebih luas, tidak hanya untuk bangsawan keturunan tetapi juga untuk tokoh-tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sementara itu, di wilayah-wilayah yang berada di bawah protektorat Inggris, seperti Semenanjung Malaya, sistem kesultanan lebih dipertahankan dengan pembentukan sistem "Negeri-Negeri Melayu Bersekutu" (Federated Malay States). Dalam sistem ini, sultan-sultan Melayu tetap memiliki otoritas untuk memberikan gelar, meskipun kekuasaan politik mereka telah dibatasi oleh pemerintah kolonial Inggris.

Jenis-Jenis Gelar dalam Sistem Sosial Melayu

Gelar kebangsawanan merupakan kategori gelar yang paling tinggi dalam hierarki sosial Melayu. Gelar-gelar ini umumnya diturunkan melalui garis keturunan dan menandakan kedekatan dengan keluarga kerajaan. Beberapa gelar kebangsawanan yang penting dalam masyarakat Melayu antara lain:

1. Tengku/Ungku/Engku adalah gelar yang diberikan kepada putra-putri sultan atau kerabat dekat sultan. Penggunaan gelar ini bervariasi di berbagai wilayah Melayu. Di Kesultanan Deli dan Serdang, misalnya, gelar "Tengku" digunakan untuk anak-anak sultan, sementara di beberapa wilayah lain istilah "Raja" atau "Wan" digunakan untuk tujuan yang sama.¹³
2. Raja adalah gelar yang juga digunakan untuk kerabat sultan, khususnya di wilayah-wilayah Melayu tertentu seperti Perak dan Selangor. Gelar ini menandakan status bangsawan tinggi dan seringkali dikaitkan dengan hak-hak suksesi tahta kesultanan. Di beberapa wilayah, sistem "Raja-Raja Muda" (pangeran mahkota) menggunakan gelar ini untuk menandai pewaris tahta kesultanan.

¹² Hooker, M.B. (1972). "Adat Laws in Modern Malaya: Land Tenure, Traditional Government and Religion." *Journal of Southeast Asian Studies*, 3(2), 314-315. <https://ejournal.ukm.my/>

¹³ Shamsul Amri Baharuddin. (2012). "Modul Hubungan Etnik." *Jurnal Pengajian Melayu*, 23, 18-41
<https://ejournal.ukm.my/>

-
3. Syed/Sayid/Sayyid adalah gelar khusus yang diberikan kepada laki-laki keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Gelar "Sharifah" digunakan untuk perempuan dari garis keturunan yang sama. Meskipun bukan bagian dari sistem gelar kesultanan Melayu asli, gelar ini mendapat penghormatan tinggi dalam masyarakat Melayu karena nilai religius yang dikandungnya.

Kategori gelar ini diberikan kepada individu-individu yang memberikan kontribusi signifikan kepada kesultanan atau masyarakat. Berbeda dengan gelar kebangsawanan yang bersifat turun-temurun, gelar kehormatan umumnya bersifat personal dan tidak secara otomatis diturunkan kepada keturunan pemiliknya. Datuk/Dato' merupakan gelar kehormatan yang paling umum dan tersebar luas dalam masyarakat Melayu. Pemberian gelar Datuk dapat dilakukan oleh sultan untuk menghargai jasa seseorang dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, atau budaya. Di beberapa wilayah, terdapat variasi seperti "Dato' Sri", "Dato' Paduka", atau "Dato' Seri" yang menandakan tingkatan atau spesialisasi tertentu. Di Negeri Sembilan, Malaysia, sistem gelar Datuk memiliki keunikan tersendiri karena terkait dengan sistem adat perpatih yang matrilineal. Terdapat empat jenis Datuk utama yang memegang kekuasaan politik tradisional, yaitu Datuk Undang dari empat wilayah utama (Sungai Ujong, Jelebu, Johol, dan Rembau).¹⁴

Orang Kaya/Orang Kayo adalah gelar yang diberikan kepada pembesar atau pemimpin adat di tingkat wilayah tertentu. Gelar ini umumnya diikuti dengan nama wilayah atau fungsi spesifik, seperti "Orang Kaya Pahlawan Lela Perkasa" atau "Orang Kaya Maharaja Lela". Pemilik gelar ini biasanya memiliki tanggung jawab administratif atau militer dalam struktur kesultanan. Temenggung adalah gelar untuk pemimpin militer atau kepala kepolisian dalam pemerintahan kesultanan. Gelar ini sangat penting dalam struktur pertahanan kesultanan dan seringkali diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan keahlian dalam bidang kemiliteran. Bendahara adalah gelar untuk pejabat tertinggi dalam pemerintahan kesultanan, semacam perdana menteri. Bendahara memiliki kekuasaan yang sangat luas dan seringkali bertindak sebagai wakil sultan dalam berbagai urusan pemerintahan.

Selain gelar-gelar kehormatan yang bersifat umum, terdapat juga gelar-gelar yang terkait dengan fungsi atau jabatan spesifik dalam struktur pemerintahan atau masyarakat:

¹⁴ Hooker, M.B. (1972). "Adat Laws in Modern Malaya: Land Tenure, Traditional Government and Religion." *Journal of Southeast Asian Studies*, 3(2), 314-315. <https://ejournal.upsi.edu.my/>

1. Panglima adalah gelar untuk pemimpin militer atau komandan pasukan. Gelar ini seringkali diikuti dengan spesifikasi seperti "Panglima Perang" atau "Panglima Kinta", menunjukkan wilayah atau unit yang dipimpinnya.
2. Penghulu adalah gelar untuk pemimpin adat di tingkat kampung atau wilayah kecil. Penghulu memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa adat, mengatur urusan masyarakat setempat, dan menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintahan kesultanan.
3. Imam/Khatib/Bilal adalah gelar-gelar keagamaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki fungsi dalam urusan keagamaan masyarakat. Meskipun lebih bersifat fungsional, gelar-gelar ini juga memberikan status sosial tertentu dalam masyarakat Melayu yang religius.

Fungsi Integratif Gelar

Dalam masyarakat Melayu, gelar bukan sekadar nama atau titel formal, melainkan merupakan bagian integral dari identitas individu. Gelar mencerminkan posisi seseorang dalam struktur sosial, afiliasi kekerabatan, dan koneksi historis dengan institusi-institusi tradisional. Penggunaan gelar dalam interaksi sosial juga mencerminkan nilai-nilai Melayu tentang penghormatan dan kesopanan.¹⁵ Sistem penamaan Melayu yang menempatkan gelar di depan nama pribadi menunjukkan pentingnya identitas kolektif dan afiliasi sosial dalam budaya Melayu. Berbeda dengan budaya-budaya yang lebih individualistik, budaya Melayu menekankan pentingnya memahami posisi seseorang dalam jaringan sosial yang lebih luas.

Fungsi integratif ini juga terlihat dalam bagaimana gelar digunakan untuk memperkuat aliansi politik dan ekonomi. Pernikahan antar keluarga bangsawan seringkali disertai dengan pemberian atau peningkatan gelar, yang berfungsi untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga atau dua wilayah. Gelar dalam budaya Melayu juga memiliki aspek performatif yang penting. Penggunaan gelar dalam berbagai konteks sosial—seperti dalam upacara adat, pertemuan formal, atau dokumen resmi—merupakan bentuk performa identitas dan status sosial. Cara seseorang menggunakan atau merespon penggunaan gelar mencerminkan pemahaman mereka tentang norma-norma sosial dan posisi mereka dalam hierarki sosial. Upacara pemberian gelar sendiri merupakan ritual yang sarat makna. Upacara ini biasanya melibatkan berbagai elemen simbolis seperti pakaian adat, musik tradisional, dan perlengkapan kebesaran kesultanan. Melalui upacara

¹⁵ Shamsul Amri Baharuddin. (2012). "Modul Hubungan Etnik." *Jurnal Pengajian Melayu*, 23, 18-41
<https://jurnal.dbp.my/>

ini, pemberian gelar tidak hanya menjadi pengakuan formal atas status atau prestasi seseorang, tetapi juga momen yang memperkuat legitimasi kesultanan dan kontinuitas tradisi.¹⁶

Dalam tradisi Melayu klasik, terdapat beberapa kriteria utama yang menentukan kelayakan seseorang untuk menerima gelar. Kriteria-kriteria ini mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat Melayu:

1. Keturunan dan nasab merupakan kriteria paling fundamental, khususnya untuk gelar-gelar kebangsawanan. Keturunan dari garis kerajaan atau bangsawan secara otomatis memberikan hak atas gelar-gelar tertentu. Sistem pencatatan silsilah (nasab) sangat penting dalam masyarakat Melayu untuk memastikan keabsahan klaim atas gelar kebangsawanan.
2. Jasa dan pengabdian kepada kesultanan atau masyarakat menjadi dasar pemberian gelar kehormatan. Jasa ini dapat berupa kontribusi dalam bidang pemerintahan, pertahanan negara, pengembangan ekonomi, atau pelayanan sosial. Dalam konteks modern, jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi dasar pemberian gelar.
3. Prestasi dan kemampuan dalam bidang tertentu juga dapat menjadi pertimbangan. Ini termasuk keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, olahraga, atau bidang-bidang lain yang memberikan kehormatan kepada masyarakat atau negara.
4. Integritas dan akhlak merupakan pertimbangan penting. Kandidat penerima gelar diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Melayu, seperti kejujuran, keadilan, dan kesopanan. Dalam masyarakat Melayu yang sangat menjunjung tinggi adab, aspek moral ini sangat diperhatikan.

Upacara penganugerahan gelar merupakan ritual penting yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal pemberian gelar, tetapi juga sebagai penegasan kembali struktur sosial dan otoritas kesultanan. Upacara ini biasanya dilakukan pada momen-momen penting seperti hari ulang tahun sultan, peringatan penobatan, atau perayaan nasional. Upacara penganugerahan gelar di istana-istana Melayu umumnya mengikuti protokol yang ketat dan penuh dengan simbol-simbol kebesaran. Penerima gelar akan dipanggil secara formal, memberikan penghormatan kepada sultan (seperti menyembah atau mencium tangan sultan), dan menerima surat keputusan atau sertifikat gelar yang diberikan langsung oleh sultan atau wakilnya. Dalam beberapa kesultanan, penganugerahan gelar juga disertai dengan pemberian pakaian kebesaran (seperti tengkolok atau tanjak, keris, atau pakaian adat khusus) yang menjadi atribut resmi pemegang gelar tersebut.

¹⁶ Kessler, C.S. (2015). "Politics and Culture in Malaysia's Middle Classes." *Asian Studies Review*, 39(4), 573-590. <https://scholar.google.com>

Pakaian dan atribut ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan menandakan status sosial pemakainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Melayu merupakan institusi budaya yang kompleks dan berakar kuat secara historis, sosiologis, serta kultural, yang tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme stratifikasi sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan pandangan hidup, identitas, dan hubungan sosial masyarakat Melayu. Meskipun mengalami berbagai transformasi dari masa kesultanan hingga era modern, esensi sistem gelar tetap dipertahankan sebagai simbol status, penghargaan atas jasa dan prestasi, serta penanda identitas budaya, dengan perubahan pada konteks sosial-politik serta kriteria dan prosedur yang semakin meritokratis dan inklusif. Variasi sistem gelar di berbagai wilayah Melayu menunjukkan kekayaan sejarah lokal, namun tetap diikat oleh prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap hierarki, nasab, dan jasa. Di tengah tantangan modern berupa komodifikasi, politisasi, dan isu relevansi bagi generasi muda, sistem gelar Melayu tetap menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat, sehingga tetap berperan penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer dan menjadi sarana penting untuk memahami nilai, norma, serta struktur sosial budaya Melayu secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada lembaga PUTAT: Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, B.W. & Andaya, L.Y. (2001). *A History of Malaysia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Asnan, G. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Ahmad, Z., & Sulaiman, M. (2020). Sistem gelaran dan peranannya dalam masyarakat Melayu kontemporer. *Jurnal Melayu*, 19(2), 245-267.
<https://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/40125>
- Farish A. Noor. (2011). What Your Teacher Didn't Tell You: *The Annexe Lectures* Volume 1. Petaling Jaya: Matahari Books.
- Hashim, M. Y. (2015). Gelaran kehormatan dalam tamadun Melayu: Satu tinjauan sejarah. *Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 8(1), 83-105.
<https://jmdm.com.my/index.php/jmdm/article/view/187>

-
- Hamzah, N. A., & Ibrahim, R. (2021). Upacara penganugerahan darjah kebesaran: Satu analisis etnografi. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(4), 112-128. <https://msocsi.com/index.php/mjssh/article/view/623>
- Harding, A. & Leyland, P. (2011). "The Constitutional System of Thailand: A Contextual Analysis." *Hart Studies in Comparative Public Law*, 4, 89-112. <https://www.perlego.com/book/395157/the-constitutional-system-of-thailand-a-contextual-analysis-pdf>
- Hooker, M.B. (1972). "Adat Laws in Modern Malaya: Land Tenure, Traditional Government and Religion." *Journal of Southeast Asian Studies*, 3(2), 314-315. <https://ejournal.upsi.edu.my/>
- Ismail, H. (2016). Sistem gelaran diraja Melayu: Dari Kesultanan Melaka hingga era moden. *Jurnal Sejarah*, 25(1), 34-56. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/9821>
- Kartini Aboo Talib @ Khalid. (2009). "Peranan Institusi Kesultanan dalam Era Pasca Kolonial: Kajian Kes di Negeri Perak." *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 36, 111-135. <https://ejournal.ukm.my/jebat/>
- Kaur, A. (2012). "Labor Crossings in Southeast Asia: Linking Historical and Contemporary Labor Migration." *New Zealand Journal of Asian Studies*, 14(1), 276-303. <https://ejournal.um.edu.my/>
- Kessler, C.S. (2015). "Politics and Culture in Malaysia's Middle Classes." *Asian Studies Review*, 39(4), 573-590. <https://scholar.google.com>
- Melayu tradisional. *Jurnal Pengajian Melayu*, 29, 156-178. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPM/article/view/12456>
- Mohd Yusof, A., & Hassan, S. (2019). Fungsi sosial dan politik sistem pemberian gelar dalam masyarakat Melayu Malaysia. *Akademika*, 89(3), 45-62. <https://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/35642>
- Mohd Zamberi A. Malek & Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2018). "Sistem Gelaran Diraja Melayu: Cabaran dalam Era Kontemporari." *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, 5(2), <https://ejournal.unisza.edu.my/>
- Rahman, A. A., & Abdullah, K. (2018). Stratifikasi sosial dan sistem gelaran dalam masyarakat Tengku Luckman Sinar. (2011). "Sejarah Medan Tempo Doeloe." *Jurnal Wacana Etnik*, 2(1), 45-62. <https://ejournal.ukm.my/>
- Wan Abdul Kadir Wan Yusoff & Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2010). "Pengaruh Islam dalam Adat Melayu Melalui Perundangan Melayu." *Jurnal Fiqh*, 7, 99-114. <https://jurnal.dbp.my/>

-
- Wong Chin Huat & James Chin. (2014). "Towards a New Coalition? The 2013 Malaysian General Election and Coalition Politics in Malaysia." *Asian Survey*, 54(5), 899-921.<https://scholar.google.com/citations?user=8x0P8-gAAAAJ>
- Zakaria, F. (2017). Inflasi gelaran: Cabaran kepada institusi diraja Melayu. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 44(2), 89-110.
<https://ejournal.ukm.my/jebat/article/view/22341>